DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perseptif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007.

Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Salman Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

_____, Filsafat *Hukum-Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Reza Zia ul-Haq, *Kapan Kapok? Kisah-Kisah Kasus Korupsi Yang Menyakitkan Hati*, Ircisod, Jogjakarta, 2013.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1990.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Pajajaran, Bandung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

C. Sumber Lain

Abdul Haris Semendawai, *Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Makalah Seminar Disampaikan Pada Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.

Maria Yudithia Bayu Hapsari, *Konsep Dan Ketentuan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2012.

D. Website

Abdul Haris Semendawai, Penanganan Dan Perlindungan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Diakses dari http://www.elsam.or.id.

Denny Indrayana, Ayo Jadi Justice Collaborator. Diakses dari http://bphn.go.id.

Pengertian korupsi, http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi. Diakses pada hari Kamis. 25 Mei 2014.

http://www.referensimakalah.com/2012/05/alat-bukti-yang-sah-menurut-kuhp_2231.html